

PENGUKURAN INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL KOTA MALANG TAHUN 2022

¹Ucca Arawindha, ²Atu Bagus Wiguna, ³Zakaria

^{1,2}Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya

³Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

e-mail: ¹uccaarawindha@ub.ac.id, ³litbangkotamlg@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.58411/pangripta.v6i1.189>

Abstrak: Pengukuran Indikator Pembangunan Bidang Sosial Kota Malang dilakukan untuk dapat mengukur capaian indikator kinerja program bidang sosial pada tahun 2021 dan tahun 2022 hingga triwulan dua, *review* target indikator pembangunan bidang sosial yang telah ditetapkan, menyajikan data-data indikator sosial, dan dapat memberikan rekomendasi kebijakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang berdasarkan hasil kajian. Terdapat 23 (dua puluh tiga) program P-RPJMD dan 54 (lima puluh empat) indikator pada bidang sosial yang sesuai dengan perangkat daerah terkait. Pengukuran indikator program pembangunan bidang sosial ini memiliki teknik analisis pengukuran capaian indikator bidang sosial, pengukuran efektivitas capaian target, pengelompokan tingkat efektivitas capaian target, dan identifikasi faktor determinan pelaksanaan program. Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa sejumlah 80% indikator telah memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi di tahun 2021. Efektivitas tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dengan selisih 23%. Akan tetapi masih terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki tingkat efektivitas sangat rendah dan 2 (dua) indikator memiliki tingkat efektivitas rendah.

Kata kunci: Capaian target, Indikator bidang sosial, Kota Malang, Tingkat efektivitas

Abstract: *Measurement of Social Development Indicators for the City of Malang is carried out to be able to measure the achievement of social sector program performance indicators in 2021 and 2022 until the second quarter, review the targets of social development indicators that have been set, present social indicator data, and be able to provide recommendations policies and steps that need to be taken by the City Government of Malang based on the results of the study. There are 23 (twenty three) P-RPJMD programs and 54 (fifty four) indicators in the social sector that are in accordance with the related regional apparatus. Measuring indicators of the social development program has analysis techniques for measuring the achievements of indicators in the social sector, measuring the effectiveness of target achievements, classifying the level of effectiveness of target achievements, and identifying the determinants of program implementation. The results of the analysis show that 80% of the indicators have a very high level of effectiveness in 2021. This effectiveness has increased from the previous year by a difference of 23%. However, there are still 3 (three) indicators that have a very low level of effectiveness and 2 (two) indicators that have a low level of effectiveness.*

Keywords: *Target achievement, social sector indicators, Malang City, level of effectiveness*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan sosial adalah peningkatan kualitas norma dan nilai dalam pranata sosial yang menghasilkan pola interaksi atau, lebih dalam lagi, pola relasi sosial (terutama menyangkut hubungan kekuasaan), baik antar individu maupun kelompok. Jadi, pembangunan sosial adalah perbaikan manusia dalam dimensi sosialnya (Wirutomo, 2013). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah

daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Suhendi, 2013). Jadi, penekanan pembangunan sosial adalah pembangunan dalam proses pemerataan sarana dan hak-hak manusia sebagai hal yang paling dasar (inklusi sosial).

Tujuan pembangunan di bidang sosial adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas

kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kelahiran total, menurunnya angka kematian kasar, meningkatnya ketahanan sosial dan budaya, meningkatnya kedudukan dan peranan perempuan, meningkatnya partisipasi aktif pemuda serta meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, terjadi permasalahan sosial dalam kehidupan manusia. Permasalahan sosial yang terjadi dapat berupa masalah kemiskinan, kesetaraan gender, kualitas kehidupan yang layak, dan lain sebagainya. Pembangunan sosial mestinya merupakan usaha preventif, yang berupaya mencegah terjadinya masalah (Habibullah, et al., 2020).

Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan proses pembangunan mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023, yang memiliki visi pembangunan “Kota Malang Bermartabat”. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah dengan salah satu misi 3 (tiga) di bidang sosial, yaitu “Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender”.

Pada kegiatan pengukuran pembangunan bidang sosial Tahun 2021, diperoleh hasil efektivitas capaian target yang masih rendah di beberapa program perangkat daerah. Capaian target yang masih rendah didominasi oleh faktor determinan adanya kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan *refocusing* anggaran dan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan lancar misalkan kegiatan koordinasi forkopimcam yang menjadi tidak rutin dilaksanakan karena adanya peraturan tidak bertemu tatap muka dan anggaran dipangkas untuk

bencana Covid-19, sehingga menyebabkan koordinasi yang sulit. Pada Tahun 2022, terdapat beberapa indikator kinerja yang belum sesuai dengan target. Oleh karena itu perlu dilakukan *review* target dan capaian indikator program pembangunan bidang sosial Kota Malang Tahun 2022 dan mengidentifikasi faktor determinan yang menyebabkan tidak tercapainya target di bidang sosial tersebut. Untuk melaksanakan *review* target dan capaian terhadap indikator kinerja sebagaimana amanat dari dokumen Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 pada Bab IX Penutup Sub Kaidah Pelaksanaan Nomor 8, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator program bidang sosial, yang merupakan perwujudan dari misi ke-3.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan kegiatan pengukuran indikator program bidang sosial Kota Malang adalah:

- a. Mengukur capaian masing-masing indikator kinerja dari program-program pembangunan bidang sosial Tahun 2022;
- b. Melakukan *review* target/sasaran indikator pembangunan bidang sosial yang telah ditetapkan sebelumnya;
- c. Menganalisis antara hasil capaian indikator-indikator kinerja dari program-program bidang sosial yang diperoleh pada Tahun 2022 dengan target/sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Menyajikan data-data terkait indikator sosial yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Malang seperti tingkat pengangguran terbuka, gini rasio, garis kemiskinan, indeks modal sosial, persentase penurunan PPKS, indeks pembangunan masyarakat, dan indeks pembangunan gender;
- e. Memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Malang berdasarkan hasil penelitian.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Kegiatan *Review* Target dan Capaian Indikator Program Pembangunan Bidang Sosial Kota Malang Tahun 2022 menerapkan pendekatan penelitian jenis campuran kuantitatif dan kualitatif serta memiliki sifat evaluatif. Penelitian kuantitatif dapat diterapkan karena tujuan beserta langkah-langkah pelaksanaan penelitian disusun sebelum kegiatan pengumpulan data. Penelitian kuantitatif lebih sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari awal hingga akhir penelitian. Penelitian kuantitatif yang dikombinasikan dengan penelitian evaluatif ini bersifat mengevaluasi program-program bidang sosial dengan mengukur capaian indikator program bidang sosial. Penerapan pendekatan kualitatif yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan mengidentifikasi faktor determinan yang mendasari efektivitas capaian indikator bidang sosial setiap perangkat daerah.

2. Evaluasi Target dan Capaian Bidang Sosial

Metode evaluasi target capaian urusan kegiatan bidang sosial dihitung secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, dapat diukur efektivitas capaian target dari indikator-indikator bidang sosial dan klasifikasinya. Secara kualitatif, dapat diidentifikasi faktor determinan dari setiap pelaksanaan program. Berdasarkan indikator program bidang sosial yang dilaksanakan oleh masing-masing dinas terkait sesuai dengan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai capaian masing-masing program serta dampaknya apabila target pada indikator tersebut tercapai ataupun tidak. Evaluasi ini dilakukan terhadap program-program yang telah dilaksanakan oleh instansi

pada Tahun 2021 hingga Tahun 2022 triwulan kedua atau bulan Juni.

a. Pengukuran efektivitas capaian target.

Efektivitas target capaian terhadap hasil Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 dilakukan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Pengelompokan tingkat efektivitas capaian target.

Pengelompokan dilakukan apabila telah diperoleh capaian indikator program. Berikut merupakan klasifikasi tingkat efektivitas capaian target.

Tabel 1. Klasifikasi Evaluasi Target Capaian

Klasifikasi	Interval Nilai
Sangat Tinggi	91-100%
Tinggi	76-90%
Sedang	66-75%
Rendah	51-65%
Sangat Rendah	<50%

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

c. Identifikasi faktor determinan pelaksanaan program.

Apabila didapatkan bahwa klasifikasi capaian program termasuk ke dalam tingkat sedang, rendah, dan sangat rendah, maka perlu diidentifikasi faktor-faktor determinan sebagai pengaruh rendahnya capaian. Selain itu, juga perlu disusun saran-saran yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan tingkat capaian tersebut. Apabila didapatkan bahwa klasifikasi capaian program termasuk ke dalam tingkat tinggi dan sangat tinggi, maka perlu disusun rekomendasi untuk mempertahankan kinerja tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pengukuran indikator pembangunan bidang sosial Kota Malang terdiri dari penyajian data indikator sosial yang meliputi, angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), gini rasio, Indeks Modal Sosial (IMS), persentase penurunan PPKS, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta hasil analisis evaluasi target dan capaian indikator bidang sosial sesuai dengan P-RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

1. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dalam mengukur kemiskinan digunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar. Berikut ini merupakan perkembangan angka kemiskinan di Kota Malang Tahun 2017-2022.

Tabel 2. Persentase Angka Kemiskinan Tahun 2017-2022

Tahun	Persentase
2018	4,10%
2019	4,07%
2020	4,44%
2021	4,62%
2022	4,37%

Sumber: BPS Kota Malang, 2022



Gambar 1. Persentase Angka Kemiskinan Kota Malang Tahun 2017-2021

Garis Kemiskinan di Kota Malang pada bulan Maret Tahun 2022 sebesar Rp. 609.612,- per kapita per bulan.

Angka kemiskinan Kota Malang pada Tahun 2022 adalah 4,37% pada bulan Maret Tahun 2022. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kota Malang pada bulan Maret Tahun 2022 mencapai 38,56 ribu jiwa (BPS Kota Malang, 2022). Meningkatnya angka kemiskinan Kota Malang tidak terlepas dari adanya pengaruh pandemi Covid-19 pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021.

Pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, telah ditetapkan target pengurangan angka kemiskinan selama lima tahun ke depan. Target angka kemiskinan pada Tahun 2021 adalah sejumlah 3,98%, akan tetapi karena adanya kondisi pemulihan pasca pandemi Covid-19, angka kemiskinan meningkat menjadi sejumlah 4,62%.

Tabel 3. Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kemiskinan Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi
2018	4,1%	4,1%
2019	3,91%	4,07%
2020	3,76%	4,44%
2021	3,98%	4,62%

Sumber: Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2022



Gambar 2. Capaian Angka Kemiskinan terhadap Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023

Apabila dibandingkan dengan target angka kemiskinan pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, capaian angka kemiskinan masih tinggi. Hal tersebut dapat terjadi akibat munculnya kondisi yang tidak dapat dikendalikan seperti

pandemi Covid-19 yang berdampak pada tingginya tingkat pengangguran.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Kegunaannya adalah memberi indikasi tentang persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran di suatu daerah atau wilayah (Noviatamara et al., 2019).

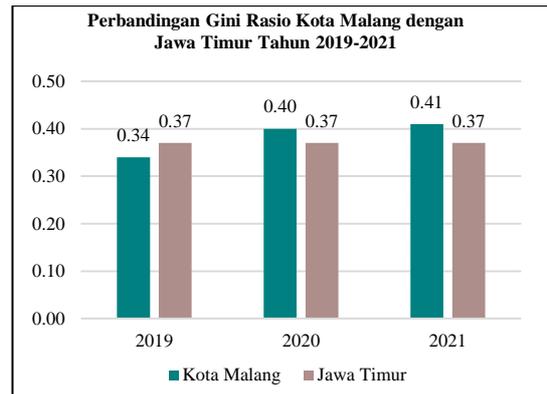


Gambar 3. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang dengan Jawa Timur Tahun 2019-2021

Pengangguran terbuka di Kota Malang Tahun 2021 adalah sebesar 9,65% dimana angka tersebut meningkat dari Tahun 2020, yaitu 9,61% dan terdapat selisih sebesar 0,04% (BPS Kota Malang, 2021). Realisasi tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang masih belum mencapai target, yaitu dengan target sejumlah 8,20% pada Tahun 2021. Jumlah pengangguran terbuka di Kota Malang Tahun 2021, yaitu sejumlah 46.542 jiwa yang terdiri dari 31.527 jiwa penduduk laki-laki dan 15.015 penduduk perempuan.

3. Gini Rasio

Gini rasio atau rasio gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.



Gambar 4. Perbandingan Gini Rasio Kota Malang dengan Jawa Timur Tahun 2019-2021

Kota Malang sering menduduki peringkat tertinggi gini rasionya di Jawa Timur. Tingginya gini rasio di Kota Malang secara formula disebabkan oleh besarnya proporsi pengeluaran 2% penduduk paling sejahtera yang menempati posisi tertinggi di Jawa Timur dan didukung oleh rendahnya proporsi pengeluaran 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah yang juga terendah di Jawa Timur. Masyarakat Kota Malang pada Tahun 2021 mengalami ketimpangan sedang (moderat). Angka tersebut masih pada taraf wajar dengan status perkotaan yang maju di antara kabupaten/kota di Jawa Timur. Gini rasio Kota Malang Tahun 2021 adalah sebesar 0,41. Angka gini rasio tersebut meningkat dari Tahun 2020 yang semula 0,40 dengan selisih peningkatan sebesar 0,01 (BPS Kota Malang, 2021). Target gini rasio Tahun 2021 sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 adalah 0,392.

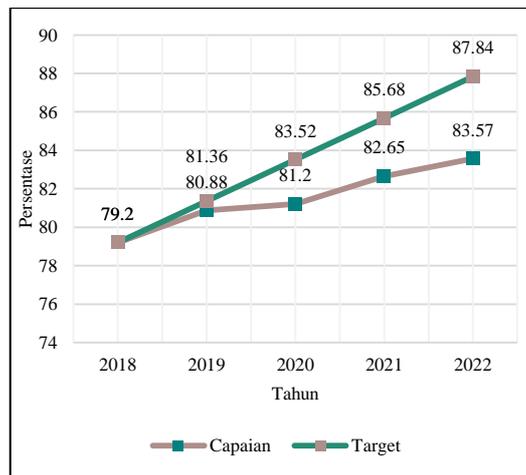
4. Indeks Modal Sosial (IMS)

Modal sosial merupakan sumber daya yang melekat pada hubungan sosial. Indeks modal sosial yang dihasilkan terbentuk dari beberapa komponen berikut, yaitu sikap percaya dan toleransi, aksi bersama, dan kelompok serta jejaring.

Tabel 4. Persentase Indeks Modal Sosial Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase
2018	79,20%
2019	80,88%
2020	81,20%
2021	82,65%
2022	83,57%

Sumber: Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2022



Gambar 5. Capaian Indeks Modal Sosial terhadap Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023

Capaian Indeks Modal Sosial masih belum melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Pada tahun 2022, selisih antara capaian dengan target sebesar 4,27%. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan modal sosial masyarakat Kota Malang. Penguatan modal sosial dapat dilakukan dengan cara menambah kegiatan yang berbasis kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan aktif mengikuti kegiatan tersebut.

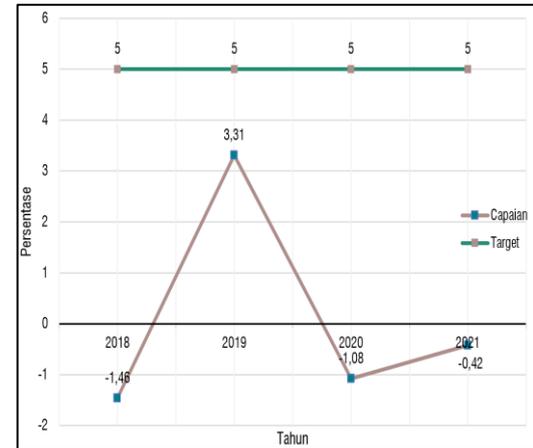
5. Persentase Penurunan PPKS

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Tabel 5. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penurunan PPKS Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi
2018	-2,23%	-1,46%
2019	5%	3,31%
2020	5%	1,08%
2021	5%	0,42%

Sumber: BPS Kota Malang, 2022



Gambar 6. Capaian Persentase Penurunan PPKS terhadap Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023

Realisasi persentase penurunan PPKS masih berada di bawah target yang ditetapkan oleh Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Pada tahun 2018, persentase penurunan PPKS berada di atas target dengan selisih sebesar 0,77%. Akan tetapi, pada tahun selanjutnya, capaian tersebut berada di bawah target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19, sehingga jumlah PPKS mengalami peningkatan, khususnya untuk jumlah pengemis. Selain itu, kurangnya perlindungan pada anak juga menyebabkan masih ditemukannya kasus anak yang diperlakukan salah di Kota Malang, seperti kekerasan pada anak dan memanfaatkan anak untuk mencari nafkah di jalanan.

6. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Indeks Pembangunan Masyarakat dapat dilihat dari gotong royong, toleransi dan rasa aman. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dijadikan sebagai tolok ukur

(benchmark) dalam mengukur kemajuan capaian pembangunan masyarakat dan gambaran mengenai kondisi pembangunan masyarakat Indonesia. Persentase IPMas mengalami kenaikan pada Tahun 2022 menjadi 84,83%. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,68%. Peningkatan nilai IPMas disebabkan oleh adanya peningkatan peran masyarakat dalam berbagai kegiatan, khususnya kegiatan perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Semakin banyak masyarakat yang turut serta dalam suatu kegiatan, maka nilai IPMas juga akan mengalami peningkatan.



Gambar 7. Capaian Indeks Pembangunan Masyarakat terhadap Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023

Capaian Indeks Pembangunan Masyarakat telah melampaui target pada Tahun 2018 hingga Tahun 2019, tetapi kembali berada di bawah target pada Tahun 2020 hingga Tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19, sehingga tingkat keterlibatan masyarakat dalam sebuah kegiatan menjadi menurun dan menyebabkan capaian IPMas juga menurun karena adanya kebijakan protokol kesehatan yang mengharuskan jaga jarak secara fisik antar manusia. Selain itu, kurangnya rasa aman akibat rendahnya penegakan hukum baik dalam bermasyarakat maupun berinvestasi juga mempengaruhi tingkat indeks rasa aman di Kota Malang.

7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Komponen pembentuk tersebut sama dengan yang digunakan dalam pengukuran IPM, yakni angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pengetahuan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin.



Gambar 8. Capaian Indeks Pembangunan Gender terhadap Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023

Indeks Pembangunan Gender belum melampaui target pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2021, selisih antara capaian dengan target sebesar 1,84%. Hal ini disebabkan masih terdapat pengesampingan hak perempuan, misalnya pada saat kegiatan tertentu seperti rapat atau gotong royong, partisipasi dari perempuan tidak dipertimbangkan, dan keterlibatan dalam kegiatan sedikit. Oleh karena itu, perlu adanya upaya keterlibatan perempuan untuk terus meningkatkan nilai IPG di Kota Malang. Program yang dapat dilakukan untuk mencapai target IPG berupa pelibatan perempuan pada setiap kegiatan agar dapat menambah tingkat partisipasi perempuan

8. Evaluasi Target dan Capaian Bidang Sosial

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, terdapat 23 program RPJMD yang termasuk ke dalam bidang sosial dengan rincian sejumlah 31 indikator kinerja. Program-program sosial tersebut merupakan bagian dari perwujudan misi ketiga, yaitu Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender.

Perangkat Daerah pengampu program bidang sosial sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 beserta hasil capaian indikator bidang sosial adalah sebagai berikut.

a. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, DisnakerPMPTSP memiliki 2 (dua) program, yaitu program penempatan kerja dan program hubungan *industrial*.



Gambar 9. Perbandingan Target dan Realisasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

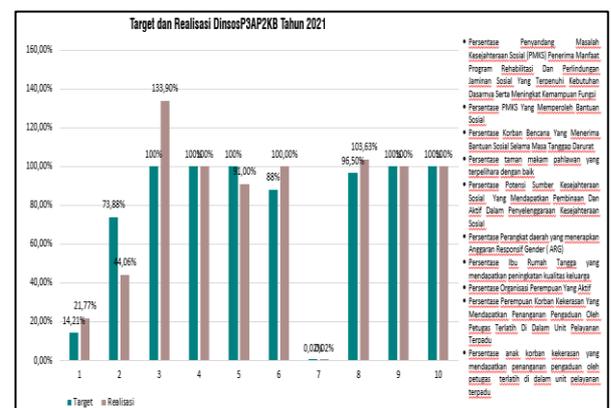
Pada Tahun 2021, hanya terdapat satu indikator yang realisasinya telah mencapai target. Indikator tersebut adalah persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, yaitu memiliki capaian 172%. Sedangkan, untuk indikator persentase pencari kerja yang ditempatkan masih

belum mencapai target. Pada Tahun 2021, efektivitas capaian persentase pencari kerja masih dikatakan sedang karena terdampak kondisi pandemi Covid-19 sehingga tidak banyak yang membuka lapangan pekerjaan.

b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk, dan Keluarga Bencana.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB) memiliki 10 (sepuluh) program di bidang sosial sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, yang terdiri dari:

- 1) Program rehabilitasi sosial;
- 2) Program perlindungan dan jaminan sosial;
- 3) Program penanganan bencana;
- 4) Program pengelolaan taman makam pahlawan;
- 5) Program pemberdayaan sosial;
- 6) Program pengelolaan sistem data gender dan anak;
- 7) Program peningkatan kualitas keluarga;
- 8) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 9) Program perlindungan perempuan;
- 10) Program perlindungan khusus anak.



Gambar 10. Perbandingan Target dan Realisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021

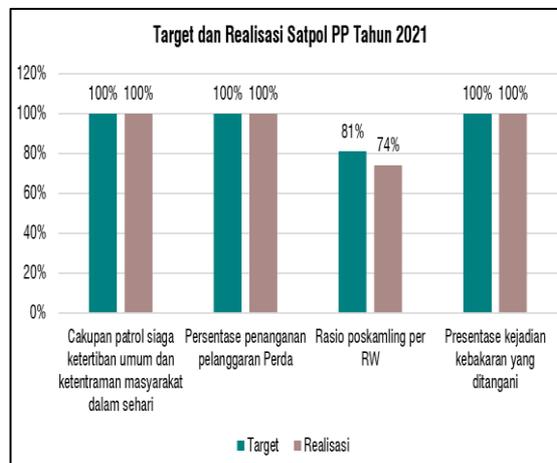
Pada Tahun 2021, terdapat satu indikator yang belum dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu indikator Anggaran Responsif Gender (ARG) karena masih dalam proses pelaksanaan, sehingga dapat dihitung ketika akhir Tahun 2022. Dari 10 (sepuluh) indikator bidang sosial RPJMD di DinsosP3AP2KB, 4 (empat) indikator telah mencapai dan melebihi target. Kemudian untuk 6 (enam) indikator lainnya, yaitu indikator persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dan indikator persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum mencapai target. Indikator persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial masih memiliki capaian target yang rendah, yaitu hanya 60% di Tahun 2021. Pada tahun 2021, terdapat kejadian PPKS yang pindah alamat tempat tinggal dan meninggal dunia, sehingga perlu proses untuk pergantian SK penerima PPKS yang memerlukan waktu lama.

c. Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 di bidang sosial, Satpol PP memiliki 2 (dua) program, yaitu program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran.

Pada tahun 2021, terdapat tiga indikator yang realisasinya telah sesuai dengan target, yaitu indikator cakupan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam sehari, persentase penanganan pelanggaran perda, dan persentase kejadian

kebakaran yang ditangani. Indikator rasio poskamling per RW belum sesuai dengan target, yaitu realisasinya sejumlah 74% dan targetnya adalah 81%.

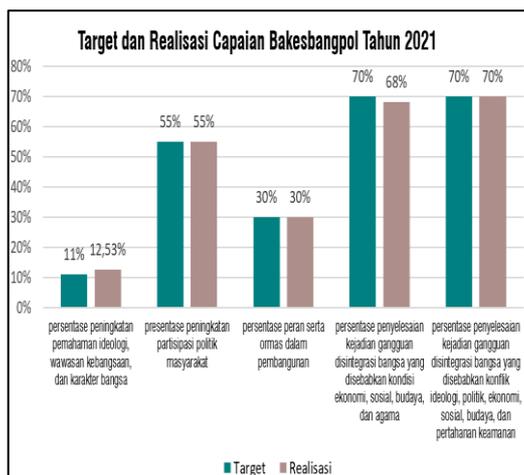


Gambar 11. Perbandingan Target dan Realisasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021

d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memiliki 5 (lima) program, yaitu sebagai berikut:

- 1) Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
- 2) Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
- 3) Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- 4) Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- 5) Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.



Gambar 12. Perbandingan Target dan Realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021

Pada Tahun 2021, hanya terdapat 1 (satu) indikator yang belum sesuai dengan target, yaitu indikator persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan agama dengan persentase realisasi sejumlah 68% dan target 70%. Indikator lainnya, yaitu persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa, persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat, persentase peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan, dan persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan oleh konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan telah sesuai dengan target.

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsinya untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien. Pada perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 misi ke-tiga, terdapat satu program yang dilaksanakan oleh BPBD, yaitu Program Penanggulangan Bencana.

Tabel 6. Target dan Capaian Indikator Bidang Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Tahun 2021

Program RPJMD	Indikator Kinerja	2021		
		Target	Realisasi	Capaian
Program penanggulangan bencana	Indeks risiko bencana (IRB)	95	91,26	104,09%
	Rata-rata waktu tanggap (<i>response time</i>) bencana	<1jam	1 jam 59 menit	49,57%
	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	37,25%	37,25%

Sumber: Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2021 dan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan 1 dan 2 Tahun 2022

Pada Tahun 2021, hanya terdapat 1 indikator yang sesuai dengan target, yaitu indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) dengan capaian sebesar 104,09%. Kedua indikator lainnya belum sesuai dengan target karena adanya kendala lunjangan korban bencana Covid-19.

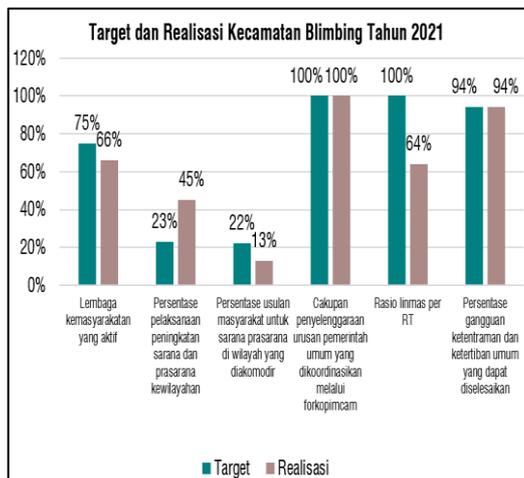
Pada Tahun 2021, indikator rata-rata waktu tanggap memiliki ketercapaian yang sangat rendah karena jumlah moda (kendaraan) yang dimiliki tidak sebanding dengan kejadian bencana seperti pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya jumlah pemakaman dan bencana yang memerlukan unit kendaraan sehingga realisasi waktu sangat jauh dari target.

Pada Tahun 2021, indikator persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik memiliki ketercapaian sangat rendah karena adanya kondisi pandemi Covid-19 dimana korban yang terdampak sangat besar, sedangkan anggaran yang tersedia tidak dapat mencukupi.

f. Kecamatan Blimbing

Kecamatan Blimbing memiliki tiga program sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, yaitu indikator lembaga

kemasyarakatan yang aktif, cakupan penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang dikoordinasikan melalui forkopimcam, rasio linmas per RT, dan persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan.



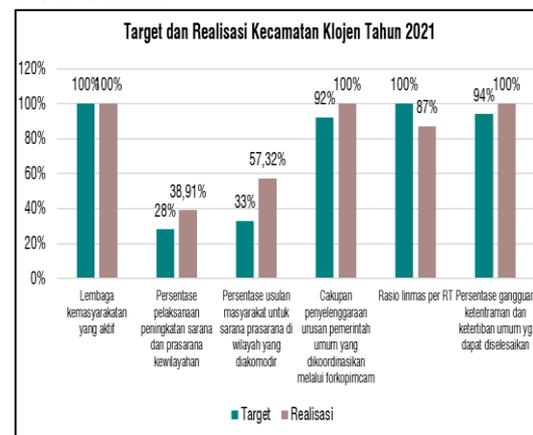
Gambar 13. Perbandingan Target dan Realisasi Kecamatan Blimbing Tahun 2021

Pada tahun 2021, terdapat 2 (dua) indikator yang sudah mencapai target, yaitu sejumlah 100% untuk indikator cakupan penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang dikoordinasikan melalui forkopimcam dan persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan. Indikator persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan memiliki realisasi yang melebihi target, yaitu sejumlah 45% dan targetnya adalah 23%. Indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif, persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir dan rasio linmas per RT memiliki realisasi yang belum sesuai dengan target.

Pada Tahun 2021 indikator rasio linmas per RT belum mencapai target karena adanya kendala kekurangan sumber daya manusia (SDM) tenaga linmas, kemudian anggaran untuk honor tidak mencukupi, dan terdapat kawasan elit yang sudah menyediakan sistem keamanan mandiri.

g. Kecamatan Klojen

Kecamatan Klojen memiliki tiga program sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, yaitu indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif, cakupan penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang dikoordinasikan melalui forkopimcam, rasio linmas per RT, dan persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan.



Gambar 14. Perbandingan Target dan Realisasi Kecamatan Klojen Tahun 2021

Pada tahun 2021, Kecamatan Klojen memiliki 5 (lima) indikator yang telah mencapai target, yaitu indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif, persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir, cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui forkopimcam, dan persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan. Akan tetapi, terdapat 1 (satu) indikator yang masih belum mencapai target 100%, yaitu indikator rasio linmas per RT yang hanya mencapai 87%.

Indikator rasio linmas per RT tidak mencapai target karena adanya kondisi dimana terdapat beberapa RT yang memiliki lebih dari 1 (satu) linmas dan terdapat kendala kekurangan anggaran untuk honor linmas tersebut. Selain itu, pada sebagian wilayah perumahan,

SDM (Sumber Daya Manusia) yang menjadi tenaga linmas bukan berasal dari Kecamatan Klojen sehingga akan memberikan konsekuensi penambahan anggaran untuk honor tenaga linmas.

h. Kecamatan Kedungkandang

Kecamatan Kedungkandang memiliki tiga program sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, yaitu indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif, cakupan penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang dikoordinasikan melalui forkopimcam, rasio linmas per RT, dan persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan. Berikut ini merupakan gambar perbandingan target dan realisasi Kecamatan Kedungkandang Tahun 2021.



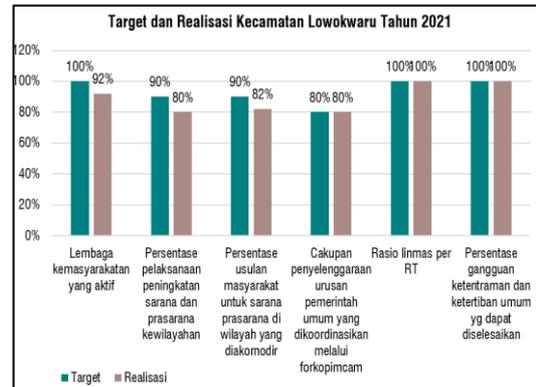
Gambar 15. Perbandingan Target dan Realisasi Kecamatan Kedungkandang Tahun 2021

Pada Tahun 2021, seluruh indikator program bidang sosial di Kecamatan Kedungkandang memiliki efektivitas capaian yang tinggi dan sangat tinggi. Terdapat satu indikator yang tidak mencapai 100%, yaitu indikator rasio linmas per RT dimana terdapat beberapa RT yang mengalami kendala kekurangan sumber daya manusia (SDM).

i. Kecamatan Lowokwaru

Kecamatan Lowokwaru memiliki tiga program sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, yaitu indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif, cakupan penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang dikoordinasikan melalui forkopimcam, rasio linmas per RT, dan persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan.

kemasyarakatan yang aktif, cakupan penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang dikoordinasikan melalui forkopimcam, rasio linmas per RT, dan persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan.



Gambar 16. Perbandingan Target dan Realisasi Kecamatan Lowokwaru Tahun 2021

Pada tahun 2021, terdapat 3 (tiga) indikator yang telah mencapai target 100%. Terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai 100%, yaitu indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif.

j. Kecamatan Sukun

Kecamatan Sukun memiliki tiga program sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, yaitu indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif, cakupan penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang dikoordinasikan melalui forkopimcam, rasio linmas per RT, dan persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan.



Gambar 17. Perbandingan Target dan Realisasi Kecamatan Sukun Tahun 2021

Pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) indikator yang telah mencapai target 100% hingga ada yang melebihi 100%, yaitu indikator cakupan penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang dikordinasikan melalui forkopimcam. Terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target 100%, yaitu indikator persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir, dan rasio linmas per RT.

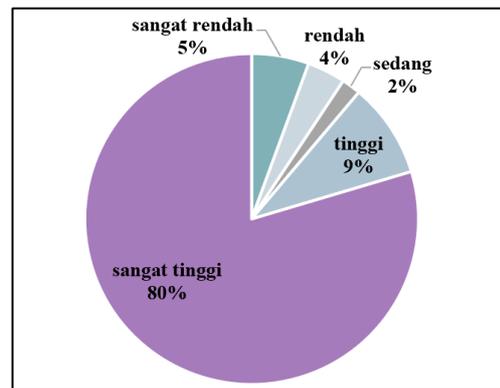
KESIMPULAN

Data-data terkait indikator sosial yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Malang seperti tingkat pengangguran terbuka, gini rasio, garis kemiskinan, indeks modal sosial, persentase penurunan PPKS, indeks pembangunan masyarakat, dan indeks pembangunan gender. Berikut merupakan data indikator sosial.

Tabel 7 Data Indikator Sosial

No	Komponen	Target	Realisasi	Keterangan	Sumber Data
1	Tingkat pengangguran terbuka	8,20%	9,61%	Belum mencapai target	BPS Kota Malang Tahun 2022
2	Gini rasio	0,392	0,41	Belum mencapai target	BPS Kota Malang Tahun 2022
3	Angka kemiskinan	3,98%	4,62%	Belum mencapai target	BPS Kota Malang Tahun 2022
4	Indeks Modal Sosial (IMS)	85,68%	82,65%	Belum mencapai target	Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2022
5	Persentase penurunan PPKS	5%	0,42%	Belum mencapai target	Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2022
6	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	86,8	84,15	Belum mencapai target	BPS Kota Malang Tahun 2022
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97%	95,16%	Belum mencapai target	BPS Kota Malang Tahun 2022

Hasil capaian indikator-indikator kinerja dari program-program pembangunan bidang sosial pada 6 instansi terkait, yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DisnakerPMPTSP), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Sukun menunjukkan bahwa sejumlah 80% indikator telah memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi di tahun 2021. Efektivitas tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dengan selisih 23%. Akan tetapi masih terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki tingkat efektivitas sangat rendah dan 2 (dua) indikator memiliki tingkat efektivitas rendah.



Gambar 18. Persentase Tingkat Efektivitas Indikator Program Bidang Sosial Kota Malang Tahun 2021.

SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, setiap indikator dari program-program di setiap Perangkat Daerah terkait memiliki potensi dan kendala atau permasalahan masing-masing.

Selain itu, indikator program bidang sosial Kota Malang yang meliputi angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), gini rasio, Indeks Modal Sosial (IMS), persentase penurunan PPKS, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih memiliki kendala dan perlu rekomendasi-rekomendasi berikut.

Angka kemiskinan Kota Malang pada Tahun 2021 sebesar 4,62% yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 seperti adanya faktor meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Malang. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan memberdayakan usaha ekonomi menengah dan kecil seperti UMKM dan menyediakan wadah bagi keterampilan masyarakat serta bentuk pelatihan kewirausahaan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pengangguran terbuka di Kota Malang Tahun 2021 adalah sebesar 9,65% yang masih belum mencapai target P-RPJMD. Rekomendasi untuk dapat menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka adalah dengan membentuk pelatihan berbasis kompetensi guna menyiapkan tenaga kerja yang berkompeten serta program meningkatkan informasi terkait lapangan pekerjaan yang tersedia.

Gini rasio Kota Malang Tahun 2021 adalah sebesar 0,41 dimana angka tersebut masih belum mencapai target sesuai dengan P-RPJMD. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang merata di seluruh wilayah dan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat.

Capaian IMS Kota Malang terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada Tahun 2021, nilai IMS Kota Malang sebesar 83,57%. Meskipun nilai tersebut telah meningkat dari tahun sebelumnya, akan tetapi

belum mencapai target P-RPJMD, yaitu 85,68%. Rekomendasi yang diberikan untuk dapat meningkatkan indeks modal sosial adalah dengan memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Melalui program tersebut dapat memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat terkait tugas dan fungsinya. Program tersebut dapat meningkatkan peran aktif kelompok tersebut kepada masyarakat, sehingga dapat menjaring masyarakat untuk turut berpartisipasi ke dalam kelompok tersebut. Selain itu, dapat juga dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya toleransi dalam bermasyarakat.

Jumlah PPKS kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2021 sebesar 0,42% dimana angka tersebut masih jauh dari target P-RPJMD, yaitu 5%. Persentase penurunan PPKS dapat ditingkatkan dengan menyediakan sarana untuk PPKS seperti panti sosial, memaksimalkan kerjasama lintas sektoral, dan pendampingan kepada PPKS untuk mengurangi korban yang diperlakukan salah.

Persentase IPMas mengalami kenaikan pada Tahun 2022 menjadi 84,83% dari tahun sebelumnya, akan tetapi masih belum mencapai target P-RPJMD. IPMas dapat ditingkatkan dengan meningkatkan rasa aman masyarakat dengan menambah titik jaga (poskamling) sesuai dengan target, kerjasama lintas sektoral seperti menyediakan CCTV lingkup kota dan menyemarakkan kegiatan atau forum umat beragama serta kegiatan masyarakat seperti gotong royong dimana semakin banyak masyarakat yang turut serta dalam suatu kegiatan, maka nilai IPMas juga akan mengalami peningkatan.

Pada Tahun 2021, IPG Kota Malang adalah 95,16%, yang meningkat dari tahun sebelumnya, akan tetapi masih belum sesuai dengan target P-RPJMD, yaitu 97%. Hal tersebut

masih terdapat pengesampingan hak perempuan bagi kalangan tertentu, misalnya pada saat kegiatan tertentu, partisipasi dari perempuan tidak dipertimbangkan, dan keterlibatan dalam kegiatan sedikit. Rekomendasi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melibatkan perempuan pada setiap kegiatan agar dapat menambah tingkat partisipasi wanita.

Efektivitas capaian program bidang sosial dipengaruhi oleh adanya potensi dan kendala atau permasalahan setiap program. Berikut ini merupakan rekomendasi berupa upaya untuk meningkatkan angka capaian masing-masing indikator dari perangkat daerah penanggung jawab.

Tabel 8 Rekomendasi

No	Perangkat Daerah	Program RPJMD	Indikator Kinerja	Rekomendasi
1	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program penempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persentase pencari kerja yang ditempatkan dapat dilakukan dengan upaya pengembangan usaha ekonomi menengah dan kecil dengan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan memperkuat pengelolaan informasi pasar kerja dengan mengadakan <i>marketing</i> setiap adanya lowongan pekerjaan di wadah <i>Job Fair</i> .
2		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dapat ditingkatkan dengan lebih mempublikasikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam tata kelola kerja yang layak dan melakukan evaluasi serta monitoring secara rutin ke setiap perusahaan untuk mengecek masa berlaku dokumen syarat kerja dan dapat memberlakukan sanksi apabila terdapat perusahaan yang tidak rutin memperbarui masa berlaku dokumen syarat kerja.
3		Program rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosial	Mempertahankan program rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial dengan pemberian bantuan sosial seperti kebutuhan pokok, bimbingan fisik, mental, spiritual, sosial, rehabilitasi sosial, dan peningkatan kerjasama antar lembaga serta kemitraan untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial.
4		Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	Diperlukan kegiatan monitoring serta <i>updating data</i> secara berkala mengenai identitas PMKS.
5		Program penanganan bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Kegiatan telah berjalan dengan baik sehingga dapat dipertahankan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada korban bencana dan koordinasi secara rutin kepada Taruna Siaga Bencana.
6		Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara dengan baik	Capaian persentase taman makam pahlawan yang terpelihara dengan baik telah sesuai dengan target dan dapat dipertahankan kegiatan pemeliharaan rutin 2 (dua) unit Taman Makam Pahlawan di Kota Malang.
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Program pemberdayaan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Mempertahankan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dengan pembinaan dan fasilitasi berupa hibah secara rutin serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8		Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Mempertahankan alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) yang setara antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan analisis gender sehingga kebutuhan dasar masing-masing gender terpenuhi, tidak ada kesenjangan antar gender, dan peningkatan <i>capacity building</i> .
9		Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase Ibu Rumah Tangga yang mendapatkan peningkatan kualitas keluarga	Persentase ibu rumah tangga dapat meningkatkan kualitas keluarga dengan memberikan wadah berupa pelatihan keterampilan ibu rumah tangga seperti menjahit, memasak, dan kegiatan kreativitas lainnya.
10		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	Mempertahankan kegiatan organisasi perempuan dengan memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan lembaga untuk pemberdayaan perempuan.
11		Program perlindungan perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Perlu mempertahankan kegiatan yang telah dilakukan dan meningkatkan kegiatan sosialisasi perlindungan kepada perempuan dan memberikan fasilitas kepada lembaga layanan perlindungan perempuan.
12		Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit	Mempertahankan perlindungan kepada anak dengan kegiatan pemberian layanan perlindungan terhadap anak dan peningkatan kualitas hidup anak melalui bimbingan forum anak.

No	Perangkat Daerah	Program RPJMD	Indikator Kinerja	Rekomendasi
13	Satuan Polisi Pamong Praja	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	<p>pelayanan terpadu</p> <p>Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam sehari</p>	<p>Efektivitas yang telah mencapai target dapat dipertahankan dengan melakukan patroli siaga ketertiban umum secara rutin 3 kali sehari, bersinergi dengan aparat keamanan lain, dan peran serta anggota satlinmas guna menciptakan lingkungan yang tenteram dan tertib.</p>
			<p>Persentase penanganan pelanggaran Perda</p>	<p>1. Penanganan pelanggaran perda dapat terus dilakukan guna menegakkan Perda yang ada di Kota Malang secara tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.</p> <p>2. Perlu peran aktif perangkat daerah pengampu Perda yang harus ditegakkan agar Satpol PP dapat menjalankan tugasnya tepat sesuai dengan prosedur dan sasaran.</p>
			<p>Rasio linmas per RW</p>	<p>Rasio linmas per RT dapat dilaksanakan sesuai target dengan menyediakan 1 linmas di setiap 1 RT selain itu dapat menjadikan kegiatan pembentukan serta fasilitasi linmas sebagai program prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>
14		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	<p>Persentase kejadian kebakaran yang ditangani</p>	<p>1. Persentase kejadian kebakaran yang ditangani dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi rutin unit pemadam kebakaran agar dapat menangani seluruh kejadian kebakaran secara tanggap.</p> <p>2. Selain menangani kejadian kebakaran, diharapkan juga dapat mencegah kebakaran dengan pengadaan APAR di setiap titik rawan kebakaran serta sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai siaga dan pertolongan pertama terhadap kejadian kebakaran.</p>
15		Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	<p>Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa</p>	<p>Tingginya efektivitas program dapat dipertahankan dengan melakukan sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan dan penyuluhan terkait narkoba secara rutin di kalangan masyarakat seperti di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah.</p>
16		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	<p>Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat</p>	<p>Efektivitas program dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi bagi pemilih pemula secara merata di seluruh wilayah Kota Malang.</p>
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	<p>Persentase peran serta ormas dalam pembangunan</p>	<p>Ketercapaian program dapat dipertahankan dengan meningkatkan kesadaran organisasi masyarakat agar turut berpartisipasi dalam pembangunan melalui kegiatan sosialisasi terhadap seluruh organisasi masyarakat di Kota Malang.</p>
18		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	<p>Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan agama</p>	<p>Program dapat dilaksanakan dan ditingkatkan persentasenya dengan rutin melakukan koordinasi pusat sehingga dapat melakukan pendekatan di masyarakat dan melayani seluruh kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan agama</p>
19		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	<p>Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan</p>	<p>Efektivitas ketercapaian program dapat dipertahankan dengan adanya pemantauan dan sosialisasi kepada masyarakat dari kelompok kerja seperti Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).</p>
20			<p>Indeks risiko bencana (IRB)</p>	<p>Efektivitas ketercapaian program dapat ditingkatkan dengan memperbanyak pelatihan mengenai risiko bencana dan meningkatkan mitigasi bencana melalui pendekatan <i>bottom up</i> dari sisi masyarakat.</p>
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program penanggulangan bencana	<p>Rata-rata waktu tanggap (<i>respon time</i>) bencana</p>	<p>Permasalahan minimnya jumlah moda untuk menangani kasus kebencanaan dapat diatasi dengan menambah jumlah moda dan diperlukan pelatihan kepada SDM untuk menanggapi bencana secara tepat sesuai dengan <i>respon time</i> yang telah ditetapkan.</p>
22			<p>Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik</p>	<p>Diperlukan koordinasi yang intens untuk dapat memberikan bantuan logistik kepada korban bencana dan memprioritaskan program karena sangat penting bagi masyarakat serta dapat membuat kemitraan dengan pihak swasta terkait ketersediaan bahan logistik yang akan diberikan kepada korban bencana.</p>
27	Kecamatan-Kecamatan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	<p>Lembaga kemasyarakatan yang aktif</p>	<p>Efektivitas ketercapaian program dapat dipertahankan dengan koordinasi dan fasilitasi melalui pelaksanaan forum terjadwal pada setiap bulan agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan seluruhnya dan lembaga kemasyarakatan dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>
			<p>Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana kewilayahan</p>	<p>Efektivitas ketercapaian program dapat dipertahankan dengan monitoring secara rutin di setiap kelurahan mengenai kondisi sarana dan prasarana sehingga dapat diketahui sarana prasarana yang perlu ditingkatkan.</p>
			<p>Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di</p>	<p>Efektivitas ketercapaian program dapat dipertahankan dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin di setiap</p>

No	Perangkat Daerah	Program RPJMD	Indikator Kinerja	Rekomendasi
			wilayah yang diakomodir	kelurahan untuk mewedahi usulan masyarakat terkait sarana dan prasarana sehingga dapat diakomodir sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
28		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang dikoordinasikan melalui forkopimcam	Efektivitas ketercapaian program dapat dipertahankan dengan melaksanakan kegiatan Forkopimcam secara rutin dan memaksimalkan dana atau anggaran yang diberikan.
29		Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Rasio linmas per RT	Rasio linmas per RT dapat diwujudkan dengan memprioritaskan program sehingga dapat dialokasikan dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk dapat menambah Linmas di RT yang belum terpenuhi dan menyediakan sarana keamanan seperti poskamling atau dapat berupa CCTV di lingkungan masyarakat.
30			Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yg dapat diselesaikan	Efektivitas ketercapaian program dapat dipertahankan dengan pelaksanaan monitoring dan koordinasi yang rutin di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. (2022). *Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang*. Kota Malang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kota Malang dalam Angka Tahun 2022*. Kota Malang: Badan Pusat Statistik.
- Habibullah, Susantyo, B., Irmayani, N., Nuryana, M., Nainggolan, T., Sugiyanto, S., & Suradi, S. (2020). *Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indonesia Tahun 2020 - 2024*. In *Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indonesia Tahun 2020 - 2024*. <https://doi.org/10.33007/book.1>
- Suhendi, A. (2013). Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 18(2), 105–116. <https://doi.org/10.33007/inf.v18i2.73>
- Wirutomo, P. (2013). Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 18(1), 101–120. <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3735>

[Halaman Kosong]